

# JURNAL

## Perencanaan Wilayah dan Pembangunan

**Analisis Pengelolaan Aset (Tanah dan Bangunan) Dan Strategi Optimalisasi Dukungan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**

Samsudin  
Adhitya Wardhono  
Regina Niken W

**Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Situbondo**

M. Arief Noeroellah  
Mohammad Fathorrazi  
Zainuri

**Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi**

Yuswan Bahtiar  
I Wayan Subagiarta  
Lilis Yuliati

**Hubungan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi Studi Dinamika Pendapatan, Hubungan Kerja dan Aset Kredit**

Wahyudi Eko Prasetyo  
Moh Adenan  
Siswoyo Hari Santosa

**Analisis Strategi Pengembangan Usaha Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Kerapu di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo**

Hudairini Fefina Renanti  
Mohammad Saleh  
Siswoyo Hari Santosa

**Analisis Kemiskinan Petani di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo**

R. Fauzi  
Rafael Purtomo Somaji  
Herman Cahyo D

**Analisis Potensi Ekonomi Reaktivasi Rel Kereta Api Situbondo - Jember Pendekatan Demand**

Yogie Kripsian Sah  
Mohammad Saleh  
Herman Cahyo D

**Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi di Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep**

Jakfar Sadik

**Peran Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2010 - 2014**

Candra Rizkhi  
Mohammad Saleh  
Siswoyo Hari Santosa

**Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Jember**

Husnu Fuad  
Agus Lutfhi  
Siswoyo Hari Santosa

**PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI**

Digital **Jurnal Perencanaan** Universitas Jember

## Wilayah dan Pembangunan

ISSN 2085 – 9651

Volume 7 Nomor 3, November 2015

### Pelindung

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember  
Direktur Pascasarjana Universitas Jember

### Pengarah

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jember  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Universitas Jember

### Editor

Siswoyo Hari Santosa  
Rafael Purtomo Somaji  
Herman Cahyo Dhiarto  
Teguh Hadi Priyono  
Moh Adenan

### Alamat Redaksi

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto  
Telp (0331) 33990; Fax(0331) 332150  
JEMBER 68121

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan (JPWP) Diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember, sebagai media profesi ilmiah, penyebaran informasi dan forum pembahasan masalah-masalah Perencanaan Wilayah dan Pembangunan

Terbit 3 (tiga) kali setahun, setiap bulan Maret, Juli dan November. Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dimuat di media lain, yang berupa hasil penelitian, ulasan atau suatu topik dalam bidang perencanaan dan pembangunan, yang berorientasi pada upaya untuk memajukan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

# JURNAL

ISSN 2085 - 9651

## Perencanaan Wilayah dan Pembangunan

Analisis Pengelolaan Aset (Tanah dan Bangunan) Dan Strategi Optimalisasi Dukungan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Samsudin  
Adhitya Wardhono  
Regina Niken W

Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Situbondo

M. Arief Noeroellah  
Mohammad Fathorazi  
Zainuri

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi

Yuswan Bahtiar  
I Wayan Subagarta  
Lilis Yuliati

Hubungan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi : Studi Dinamika Pendapatan, Hubungan Kerja dan Aset Kredit

Wahyudi Eko Prasetyo  
Moh Adenan ✓  
Siswoyo Hari Santosa

Analisis Strategi Pengembangan Usaha Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Kerapu di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

Hudairini Fefina Renanti  
Mohammad Saleh  
Siswoyo Hari Santosa

Analisis Kemiskinan Petani di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

R. Fauzi  
Rafael Purতোমো Somaji  
Herman Cahyo D

Analisis Potensi Ekonomi Reaktivasi Rel Kereta Api Situbondo – Jember Pendekatan Demand

Yogie Kripsian Sah  
Mohammad Saleh  
Herman Cahyo D

Design Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi di Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep

Jakfar Sadik

Peran Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2010 – 2014

Candra Rizkhi  
Mohammad Saleh  
Siswoyo Hari Santosa

Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Jember

Husnu Fuad  
Agus Lutfhi  
Siswoyo Hari Santosa

**PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI**

**HUBUNGAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Wahyudi Eko Prasetyo, Moh. Adenan dan Siswoyo Hari Santosa  
Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

**ABSTRACT**

*The purpose of this study wereto analyze the performance of financial management in Banyuwangi years 2004-2013; to analyze financial independence in Banyuwangi years 2004-2013; to analyze the level of prosperity in Banyuwangi years 2004-2013; to analyze the relationship between the financial performance of the public welfare Banyuwangi years 2004-2013 and to determine the financial performance improvement strategy Banyuwangi years 2004-2013. This research is a descriptive study with the hypothesis testing approach. All data on the calculation, will be analyzed using descriptive and Man Whitney and correlation analysis. The unit of analysis in this study was the Banyuwangi regency during the years 2004-2013. The results showed that the performance of financial management in Banyuwangi years 2004-2013 was described by the ratio of the effectiveness of Banyuwangi are included in the category is quite effective in realizing regional income. Financial management Banyuwangi district budget included in the category inefficient. Financial independence Banyuwangi in crisis because of the region's autonomy PAD contribution to regional income below 50% in addition to the 2004 level of welfare in Banyuwangi years 2004 to 2013 measured by the Human Development Index (HDI) Kabuputaen Banyuwangi years 2004 to 2013 have increased during the study period. The relationship between the financiai performance of the public welfare Banyuwangi years 2004-2013 are shown there is a relationship between the ratio of independence against the HDI. The relationship between the ratio of the HDI proved its significant effectiveness and efficiency of the relationship between the ratio of HDI proved significant. These results prove that financial performance had a positive correlation with the level of social welfare. Financial performance improvement strategy Banyuwangi years 2004-2013 include efforts to mobilize sources of local revenue that arise.*

**Keywords:** *efficiency, effectiveness, independence, financial management performance and well-being*

**1. Pendahuluan**

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menegaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan

serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu terjadi penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.

Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah di Indonesia selama ini telah banyak dilakukan, di antaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten. Hal ini menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mone (2012) menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah kabupaten yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Utama, 2008:30)

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita, usia harapan hidup dan tingkat pendidikan yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index = HDI*. Peningkatan IPM tersebut menunjukkan adanya tingkat kemiskinan yang semakin tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Hal itu disebabkan adanya penurunan di pengukuran IMP dan pendapatan per kapita

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013
2. Untuk menganalisis kemandirian keuangan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013.
3. Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013.
4. Untuk menganalisis hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013
5. Untuk mengetahui strategi peningkatan kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *hypotesis testing*. Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dengan

menggunakan indikator rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian belanja, dan analisis tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator pendapatan perkapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Banyuwangi selama dua pemerintahan selama tahun 2004-2013. Seluruh data hasil perhitungan, akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis Man Whitney serta korelasi untuk mengetahui hubungan signifikan kinerja keuangan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2004-2013. Pemilihan Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian karena Kabupaten Banyuwangi sebagai obyek penelitian dengan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan tingkat kesejahteraan masyarakat

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* tahun 2004-2013. Data yang akan dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan perhitungan APBD yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan data PDRB serta jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.

### 3. Hasil Penelitian

Pengukuran kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi dijelaskan dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan

#### a) Rasio Kemandirian Kabupaten Banyuwangi

Rasio kemandirian daerah dapat juga digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Kedua rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar angka rasio PAD maka makin tinggi tingkat kemandirian. Rasio kemandirian daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan oleh daerah. Rasio PAD menggambarkan keberdayaan daerah dalam hal menggali potensi ekonomi lokal semakin besar rasio PAD, semakin berdaya dan mandiri suatu daerah untuk mendanai program-ya. Sedangkan rasio dana transfer menggambarkan tingkat ketergantungan daerah atas dana transfer yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio dana transfer, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kabupaten Banyuwangi mengalami krisis kemandirian daerah karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dibawah 50% selain tahun 2004. Sekaligus menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal dalam penerimaan daerahnya.

Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan rata-rata rasio kemandirian seluruh Kabupaten Banyuwangi tetapi masih dibawah 50%. Hal itu menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap keuangan dari pusat masih tinggi.

#### b) Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah

Efektivitas manajemen keuangan daerah adalah besarnya rasio realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi terhadap target APBD yang dinyatakan dalam skala rasio dan satuan persentase. Berdasarkan APBD di Kabupaten Banyuwangi diketahui nilai rata-rata

keseluruhan rasio efektivitas. Nilai rata-rata efektivitas Kabupaten Banyuwangi tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara agregat, pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat merealisasikan target PAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas tinggi dapat dicapai karena daerah telah berhasil mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, maupun karena penetapan target yang terlalu rendah, sehingga pencapaian target penerimaan bukan hal yang susah untuk dilaksanakan. Rasio efektivitas Kabupaten Banyuwangi

Hasil deskripsi menunjukkan terdapat Kabupaten Banyuwangi yang termasuk dalam kategori cukup efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah. Semakin kurang efektif realisasi penerimaan, memberikan peluang yang semakin kecil pula dalam penyediaan dana kegiatan Daerah dengan realisasi PAD rendah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerahnya baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pendapatan.

#### c) Efisiensi manajemen keuangan daerah

Efisiensi manajemen keuangan daerah adalah besarnya rasio pengeluaran belanja daerah terhadap pendapatan daerah. Rata-rata keseluruhan dari rasio efisiensi belanja pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013. Nilai ini menunjukkan bahwa secara agregat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih kurang efisien dalam mengelola keuangan daerah. Rasio efisiensi belanja di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 disajikan dalam rasio efisiensi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan. Rasio ini menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori tidak efisien.

### 3.1 Hasil Uji Statistik

#### a. Hasil Uji *Man Whitney*

Uji ini digunakan untuk menguji Uji *Man Whitney* Hasil uji *Man Whitney* menunjukkan bahwa ada perbedaan antara rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi serta IPM Kabupaten Banyuwangi selama dua periode tahun yaitu 2004-2010 dan tahun 2010-2014. Hal itu dijelaskan dengan perbedaan rata-rata kinerja keuangan sebagai berikut.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan antara kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi selama dua periode tahun antara tahun 2002-2013. Hal itu dijelaskan dengan nilai rata-rata rasio keuangan.

#### b. Hasil Korelasi

Uji ini digunakan untuk menguji Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki hubungan dengan IPM. Hal itu ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,698 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,004 < 0,005$ . Terbukti signifikan ada hubungan antara rasio kemandirian terhadap IPM. Hubungan antara rasio efektivitas dengan IPM ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,638 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,007 < 0,005$ . Kemudian hubungan antara rasio efisiensi terhadap IPM dijelaskan dengan nilai korelasi sebesar 0,888 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ . Hasil ini membuktikan bahwa kinerja keuangan memiliki hubungan positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Berdasarkan arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, maka kebijakan umum anggaran yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan pada periode-periode sebelumnya. Kebijakan pendapatan daerah, khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan. Dalam periode ini diupayakan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Dengan demikian, dapat diwujudkan stabilitas fiskal daerah, khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Kebijakan belanja daerah adalah melalui upaya adanya perimbangan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya, serta peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaan program-program pembangunan yang mengarah pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengalokasikan anggaran harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran, serta Efisiensi dan efektifitas anggaran:
  - a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, program, fungsi, dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, sehingga penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel;
  - b. Disiplin Anggaran:
    1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;



2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan;
  3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBD melalui rekening Kas Umum Daerah.
- c. Keadilan anggaran: tidak adanya diskriminasi penetapan tarif dalam pungutan yang diberlakukan pada masyarakat, sedangkan dalam konteks belanja harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata tanpa diskriminasi.
  - d. Efisiensi dan efektifitas anggaran: untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator prestasi kerja. Selain itu, penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.
3. Usulan program, kegiatan, dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui akselerasi dan sinkronisasi program bersama stakeholders. Penilaian kewajaran meliputi:
    - a. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi daerah;
    - b. Kaitan logis antara permasalahan yang akan diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan;
    - c. Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan;
    - d. Keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga memberikan manfaat dampak positif bagi masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  4. Kebijakan umum anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
    - a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat *public services* seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;
    - b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
    - c. Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013

Pengukuran kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi dijelaskan dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Efektivitas manajemen keuangan daerah adalah besarnya rasio realisasi APBD Kabupaten Banyuwangi terhadap target APBD yang dinyatakan dalam skala rasio dan satuan persentase. Berdasarkan APBD di Kabupaten Banyuwangi diketahui nilai rata-rata keseluruhan rasio efektivitas. Nilai rata-rata efektivitas Kabupaten Banyuwangi tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara agregat, pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat merealisasikan target PAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kabupaten Banyuwangi yang termasuk dalam kategori cukup efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah. Semakin kurang efektif realisasi penerimaan, memberikan peluang yang semakin kecil pula dalam penyediaan dana kegiatan Daerah dengan realisasi PAD rendah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerahnya baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pendapatan.

Efisiensi manajemen keuangan daerah adalah besarnya rasio pengeluaran belanja daerah terhadap pendapatan daerah. Rasio efisiensi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan. Rasio ini menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori tidak efisien. Dengan efektivitas manajemen keuangan daerah maka perencanaan anggaran dapat diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional (PPRI Nomor 58 Tahun 2005)., maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

##### 4.2 Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Rasio kemandirian daerah dapat juga digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Kedua rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar angka rasio PAD maka makin tinggi tingkat kemandirian. Rasio kemandirian daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan oleh daerah.

Kabupaten Banyuwangi mengalami krisis kemandirian daerah karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dibawah 50% selain tahun 2004. Sekaligus

menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal dalam penerimaan daerahnya. Hal ini sesuai dengan Prabowo (1999: 149), sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri. Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013

IPM Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan yang semakin tinggi dari 63,35 tahun 2002 sampai 71,02 di tahun 2013. Peningkatan IPM tersebut menunjukkan adanya tingkat kemiskinan yang semakin tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Hal itu disebabkan adanya penurunan di pengukuran IMP dan pendapatan per kapita. IPM Kabupaten Banyuwangi ini dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur, angkanya selalu berada di bawah angka Jawa Timur dengan urutan ke 26. Ini merupakan urutan yang relatif tertinggal karena menempati di tiga perempat bagian terbawah. Artinya jalan untuk menuju sasaran ideal yang berupa pembangunan manusia seutuhnya yang ditandai dengan kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk bisa segera terwujud masih membutuhkan waktu yang relatif lama.

#### **4.3 Hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013.**

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki hubungan dengan IPM. Hal itu ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,698 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,004 < 0,005$ . Terbukti signifikan ada hubungan antara rasio kemandirian terhadap IPM. Hubungan antara rasio efektivitas dengan IPM ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,638 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,007 < 0,005$ . Kemudian hubungan antara rasio efisiensi terhadap IPM dijelaskan dengan nilai korelasi sebesar 0,888 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ . Hasil ini membuktikan bahwa kinerja keuangan memiliki hubungan positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Azwar dan Subektan (2012) tingkat kemandirian keuangan daerah berada di pola tata hubungan instruktif yang mengarah pada kemandirian pemerintah daerah. Tingkat efektivitas keuangan daerah berada di posisi yang sangat efektif dan tingkat efisiensi keuangan daerah berada di posisi yang kurang efisien. Selain itu, Simanjuntak dan Muklis (2015) meneliti tentang interaksi antara dana menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kapasitas keuangan, kapasitas keuangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, kapasitas keuangan berpengaruh negatif terhadap

struktur keuangan pemerintah dan kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap IPM.

#### 4.4 Strategi Peningkatan Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi maka dapat dijelaskan strategi peningkatan kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan pendapatan daerah, khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan. Dalam periode ini diupayakan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Dengan demikian, dapat diwujudkan stabilitas fiskal daerah, khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam mengalokasikan anggaran harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran, serta Efisiensi dan efektifitas anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, program, fungsi, dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, sehingga penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kebijakan umum anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Strategi yang bisa diterapkan dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan Pendapatan Daerah yang dicerminkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target indikator kinerja seperti meningkatkan target peningkatan, Jumlah Macam Pajak Daerah tidak ditargetkan ada peningkatan karena dibatasi oleh Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa jumlah macam pajak daerah yang diperkenankan dipungut oleh daerah mulai tahun 2011 adalah sebanyak 11 macam, meningkat 4 macam jenis pajak daerah dari tahun sebelumnya yang hanya 7 macam. Kemudian jumlah Macam Retribusi Daerah tidak ditargetkan ada peningkatan karena dibatasi oleh Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa jumlah macam retribusi daerah yang diperkenankan dipungut oleh daerah mulai tahun 2011 adalah sebanyak 30 macam, meningkat 5 macam jenis retribusi daerah dari tahun sebelumnya yang hanya 25 macam.

### 5. Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 dijelaskan oleh rasio efektivitas Kabupaten Banyuwangi yang termasuk dalam kategori cukup efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah. Semakin kurang efektif realisasi penerimaan, memberikan peluang yang semakin kecil pula dalam penyediaan dana kegiatan Daerah. Rasio efisiensi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan. Rasio ini menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi

realisasi pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori tidak efisien

2. Kemandirian keuangan Kabupaten Banyuwangi mengalami krisis kemandirian daerah karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dibawah 50% selain tahun 2004. Sekaligus menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal dalam penerimaan daerahnya.
3. Tingkat kesejahteraan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 mengalami peningkatan selama periode penelitian. Hal itu berarti ada peningkatan tetapi masih dalam taraf tingkat kesejahteraan yang rendah.
4. Hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,698 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,004 < 0,005$ . Terbukti signifikan ada hubungan antara rasio kemandirian terhadap IPM. Hubungan antara rasio efektivitas dengan IPM ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,638 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,007 < 0,005$ . Kemudian hubungan antara rasio efisiensi terhadap IPM dijelaskan dengan nilai korelasi sebesar 0,888 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,020 < 0,05$ . Hasil ini membuktikan bahwa kinerja keuangan memiliki hubungan positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat
5. Strategi peningkatan kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 antara lain:
  1. Strategi lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan pada periode-periode sebelumnya
  2. Kebijakan belanja daerah adalah melalui upaya adanya perimbangan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya, serta peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaan program-program pembangunan yang mengarah pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
  3. Usulan program, kegiatan, dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui akselerasi dan sinkronisasi program bersama stakeholders
  4. Kebijakan umum anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta;
2. Meningkatkan penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
3. Peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl,Roy.W.1999. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization*, World Bank,NewYork
- Davey K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerbit UI Press
- Diana, Heny F. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 14 No. 8 Hal. 193 – 229.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2008. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002 – 2006. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Utama, K. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Revisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliati. 2001. *Dampak APBD Terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.